

## Perekonomian di Kalimantan Selatan Terus Menunjukkan Tren Positif



Sumber gambar:

[https://img.antaranews.com/cache/730x487/2022/07/14/Screenshot\\_2022-07-13-21-04-48-93.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/730x487/2022/07/14/Screenshot_2022-07-13-21-04-48-93.jpg.webp)

Capaian pendapatan negara di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kegiatan perekonomian regional. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah mengatakan, sampai dengan 30 Juni 2022 kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif dengan didominasi sektor pertambangan.

“Pengaruh tertinggi penerimaan negara berasal dari aktivitas pertambangan periode akhir 2021 ternyata masih berdampak pada penerimaan perpajakan pada Juni 2022, selain disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan masyarakat,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Selasa (2/8/2022).

Menurut Sulaimansyah, hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp9.181,29 miliar atau 86,44 persen dari target, tumbuh lebih tinggi 98,26 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2021 atau meningkat sebesar Rp4.550,24 miliar.

“Untuk realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2022 telah mencapai Rp8.553,52 miliar atau 87,93 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp9.728 Miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,27 persen (y-o-y),” ucap Sulaimansyah.

Disamping itu, Sulaimansyah menyampaikan, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp695,02 miliar hingga akhir Juni 2022, angka tersebut telah melewati target dengan capaian 416,39 persen dari target yang ditetapkan. “Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNPB di Kalsel mencapai nilai Rp627,77 miliar atau 70,26 persen dari target,” ujar Sulaimansyah.

Untuk realisasi belanja negara sampai dengan Juni 2022 mencapai Rp11.467,47 miliar atau 45,71 persen dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 5,66 persen, dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

“Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp3.170,24 miliar (38,69 persen pagu) atau turun 14,70 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2021 mencapai Rp3.716,61 miliar,” tambah Sulaimansyah.

Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, menurut Sulaimansyah, masih dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal yang cukup besar pada awal 2022, karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat *multi years* akibat pandemi COVID-19 sebagaimana yang terjadi pada awal tahun lalu.

Di samping itu, pengenaan PPN 11 persen dan pembatasan barang impor ikut berkontribusi pada lambatnya penyerapan alokasi anggaran.

“Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel sampai akhir Juni 2022 tercatat Rp8.297,23 miliar atau 49,12 persen dari pagu, kemudian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai Juni 2022 masing-masing telah mencapai Rp1.783,71 miliar (41,43 persen pagu) dan Rp4.320,71 miliar (57,70 persen),” kata Sulaimansyah.

Sementara itu, untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai akhir Juni 2022 di Kalsel telah direalisasikan sebesar Rp1.325,37 miliar (36,99 persen pagu) yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik. Sedangkan penyaluran Dana Desa di Kalsel telah mencapai Rp821,83 miliar atau sebesar 57,61 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 28,44 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan dapat mencairkan Dana Desa senilai Rp639,86 miliar.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dana Desa (DD) untuk 1.864 desa ke 11 kabupaten di Kalimantan Selatan dengan total pagu Rp 1,426 triliun, sudah tersalurkan sebesar 62,90 persen per 13 Juli 2022 ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel Faried Fakhmansyah mengatakan bahwa rata-rata penyaluran DD ke setiap kabupaten sudah di atas 50 persen. "Penyaluran semua dalam proses, dan penyaluran berangsur sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 190 bahwa penyaluran Dana Desa terdiri tiga tahap," ujarnya, Rabu, kepada ANTARA di Banjarmasin.

Terpisah, Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Yassiana Damhudie merinci ; tahap satu penyaluran DD 40 persen, tahap dua penyaluran DD 40 persen dan tahap tiga penyaluran DD 20 persen. Penyaluran DD ke 1.864 desa di Kalsel, katanya, hingga saat ini lancar, sebab pemerintah desa sedang dalam proses pengajuan penyaluran DD tahap dua dan pengajuan tahap tiga. “Target penyaluran selesai sampai Desember 2022 sesuai dengan regulasi nya,” ujarnya.

Melalui media ini, Yassiana berpesan agar setiap desa dapat segera melakukan pengajuan DD sesuai tahapan. Selain itu, merealisasikan serta pemanfaatan DD sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, sesuai kewenangan

Desa. “Yaitu, BLT DD, pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas Nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa,” ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2022/08/02/perekonomian-di-kalsel-terus-menunjukkan-tren-positif/>
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/335477/penyaluran-dana-desa-di-kalsel-62-90-persen>, (14/07/22)

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;
 

Diutamakan untuk:

    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
    - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
    - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa

penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.